



**BADAN KEAHLIAN
DPR RI**
*Bridging research to parliament
Evidence based policy making*

DIPLOMASI BAHASA PORTUGIS DALAM PENDIDIKAN NASIONAL

Elga Andina

Analisis Legislatif Ahli Madya

elga.andina@dpr.go.id

Isu dan Permasalahan

Presiden Prabowo Subianto menyatakan bahwa bahasa Portugis akan menjadi bahasa asing prioritas dalam sistem pendidikan nasional Indonesia. Hal ini disampaikan usai pertemuan bilateral dengan Presiden Brasil Luiz Inácio Lula da Silva di Istana Merdeka, Jakarta, pada 23 Oktober 2025. Langkah tersebut merupakan bagian dari strategi diplomasi budaya dan kerja sama Selatan-Selatan, serta upaya memperkuat hubungan Indonesia dengan negara-negara berbahasa Portugis seperti Brasil, Portugal, Angola, dan Timor Leste. Dua kementerian, yakni Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah serta Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, ditugaskan untuk menyusun kurikulum dan memulai implementasi pengajaran bahasa Portugis di berbagai jenjang pendidikan.

Kebijakan ini menuai beragam tanggapan dari masyarakat dan kalangan pendidikan. Pengamat pendidikan, Ina Liem, menilai pengajaran bahasa Portugis sebaiknya tidak langsung diwajibkan, melainkan diperkenalkan melalui kegiatan ekstrakurikuler atau proyek interdisipliner agar sesuai dengan semangat kurikulum nasional. Menurutnya, pendekatan bertahap akan lebih realistis mengingat keterbatasan tenaga pengajar dan sumber belajar bahasa Portugis di Indonesia. Aktivis Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI), Ubaid Matraji, mengingatkan dalam pengukuran Asesmen Nasional, mata pelajaran bahasa Indonesia selalu menjadi mata pelajaran dengan nilai terendah. Hal ini menunjukkan masih perlunya langkah komprehensif untuk meningkatkan kemampuan berbahasa nasional. Status daya literasi yang masih rendah ini perlu menjadi pertimbangan untuk menambahkan mata pelajaran bahasa Portugis ke dalam kurikulum.

Komisi X DPR RI juga memberikan perhatian serius terhadap rencana tersebut. Anggota Komisi X DPR RI, Bonnie Triyana, menilai kebijakan pengajaran bahasa Portugis berpotensi memberatkan siswa karena bahasa ini belum banyak digunakan dalam pergaulan internasional. Ia menekankan pentingnya kajian komprehensif sebelum kebijakan diterapkan secara luas. Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian, mengusulkan agar program pengajaran bahasa Portugis diujicobakan terlebih dahulu di daerah yang memiliki kedekatan historis dan budaya dengan dunia Lusofon, seperti Nusa Tenggara Timur (NTT) yang berbatasan langsung dengan Timor Leste.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian Irfani, mengapresiasi itikad baik Presiden Prabowo dalam memperkuat hubungan diplomatik dengan Brasil. Ia menilai rencana ini berpotensi menjadi langkah strategis jika disiapkan dengan matang dan dijalankan secara berkelanjutan. Namun, ia juga menekankan pentingnya asas timbal balik agar kerja sama ini membawa keuntungan bagi kedua negara, misalnya melalui program pertukaran budaya dan pengajaran bahasa Indonesia di Brasil.

Dari pihak pemerintah, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah menyatakan mendukung penguasaan bahasa asing bagi pelajar Indonesia, meski hingga kini belum ada pembahasan teknis terkait implementasi gagasan Presiden. Kementerian masih menunggu arahan resmi untuk memastikan pelaksanaan. Persiapan yang dibutuhkan mencakup pelatihan guru, penyusunan bahan ajar, serta penyesuaian kurikulum agar relevan dengan konteks pendidikan

nasional. Evaluasi terhadap kesiapan sekolah dan ketersediaan anggaran juga menjadi faktor penting agar kebijakan ini tidak menggeser prioritas pembelajaran bahasa Indonesia dan bahasa daerah sebagai dasar literasi nasional.

Di lapangan, tantangan awal sudah terlihat. Beberapa wilayah pelaksana menyebut bahwa ketersediaan guru bahasa Portugis sangat terbatas. Sebagai contoh, Kepala Dinas Pendidikan Sumatera Utara (Sumut), Alexander Sinulingga, mengaku cukup sulit mencari guru bahasa Portugis di Sumut. Dengan begitu ada potensi penambahan anggaran untuk menyediakan sumber daya manusia yang dibutuhkan.

Yang perlu dicatat adalah pengajaran bahasa Portugis harus memiliki dasar manfaat strategis yang jelas dan tidak mengurangi fungsi bahasa Indonesia sebagai identitas nasional. Tanpa pengelolaan dan evaluasi yang jelas, langkah ini berisiko menjadi proyek simbolik alih-alih program yang benar-benar memperkuat mutu pendidikan dan koneksi internasional pelajar Indonesia.

Atensi DPR

Jika rencana ini terwujud, Komisi X DPR RI berperan strategis dalam memastikan implementasi kebijakan pengajaran bahasa Portugis berjalan efektif dan tidak membebani peserta didik. Dari sisi fungsi pengawasan, Komisi X DPR RI perlu memastikan kesiapan sumber daya manusia, kurikulum, serta infrastruktur pendukung di setiap jenjang pendidikan. Komisi X DPR RI juga dapat mendorong evaluasi komprehensif implementasi untuk menilai manfaat strategis kebijakan bagi peningkatan daya saing global pelajar. Melalui fungsi legislasi, Komisi X DPR RI dapat mendorong inisiasi atau perbaruan regulasi terkait tata kelola pembelajaran bahasa asing di sekolah, termasuk mekanisme kerja sama internasional dengan negara-negara berbahasa Portugis. Dalam fungsi anggaran, Komisi X DPR RI dapat meninjau alokasi pembiayaan untuk pelatihan guru, pengadaan bahan ajar, dan pengembangan kurikulum. Pengawasan terhadap efektivitas penggunaan anggaran menjadi kunci agar kebijakan ini tidak menggeser prioritas utama pembangunan pendidikan nasional.

Sumber

detiksumut.com, 29 Oktober 2025;
kompas.com, 23 Oktober 2025;
kumparan.com, 23 Oktober 2025;
Media Indonesia, 29 Oktober 2025;
tempo.co, 26 dan 27 Oktober 2025.



Koordinator Sali Susiana
Polhukam Puteri Hikmawati
Ekkuinbang Sony Hendra P.
Kesra Hartini Retnaningsih

EDITOR

Polhukam

Ahmad Budiman
Prayudi
Rachmi Suprihartanti S.
Novianti

Ekkuinbang

Sri Nurhayati Q.
Rafika Sari
Ari Muliarta Ginting
Eka Budiyantri
Edmira Rivani
Hilma Meilani

Kesra

Trias Palupi K.
Luthvi Febryka Nola
Yulia Indahri

LAYOUTER

Devindra Ramkas O.
Ully Ngesti Pratiwi
Desty Bulandari
Yustina Sari

Firyal Nabihah
Ulayya Sarfina
Yosua Pardamean S.
Jeffrey Ivan Vincent
Fauzan Lazuardi R.
Anugrah Juwita Sari

Timothy Joseph S. G.
Nur Sholikah P. S.
Fieka Nurul Arifa



<https://pusaka.dpr.go.id>



@pusaka_bkdprri

©PusakaBK2025



*Bridging Research to Parliament
Evidence Based Policy Making*